



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26
TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung tersedianya sarana kerja Kendaraan Dinas;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 35);
- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 08);
- c. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 38)

diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 April 2026
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 April 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 6 TAHUN 2026

TANGGAL : 23 April 2026

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NOMOR POLISI	NOMOR BERIKUTNYA
1	2	3	4
I.	MUSPIDA		
1	Gubernur Gorontalo	DM 1	-
2	Wakil Gubernur Gorontalo	DM 2	-
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 3	-
4	Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo	DM 4	DM 1004 P – 1904 P
5	Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo	DM 5	DM 1005 P – 1905 P
6	Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	DM 6	-
7	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 7	-
8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 8	-
9	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 9	-
II.	UNSUR LAINNYA		
1	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Gorontalo	DM 10	DM 1010 P – 1910 P
2	Kosong	DM 11	-
3	Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan Provinsi Gorontalo	DM 12	-
4	Asisten SEKDA Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Provinsi Gorontalo	DM 13	-
5	Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum Provinsi Gorontalo	DM 14	-
6	Rektor Universitas Negeri Gorontalo	DM 15	DM 1015 P – 1915 P
7	Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	DM 16	DM 1016 P – 1916 P
8	Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo	DM 17	DM 1017 P – 1917 P
9	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo	DM 18	-
10	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo	DM 19	-
III.	SKPD PROVINSI		
	INSPEKTORAT, SEKRETARIAT, BADAN (DM 20 – DM 28)		
1	Inspektorat Provinsi Gorontalo	DM 20	DM 1020 P – 1920 P
2	Sekretaris DPRD Daerah Provinsi Gorontalo	DM 21	DM 1021 P – 1921 P

3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo	DM 22	DM 1022 P – 1922 P
4	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo	DM 23	DM 1023 P – 1923 P
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo	DM 24	DM 1024 P – 1924 P
6	Badan Pendapatan Daerah Prov.Gorontalo	DM 25	DM 1025 P – 1925 P
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo	DM 26	DM 1026 P – 1926 P
8	Badan Penghubung Provinsi Gorontalo	DM 27	DM 1027 P – 1927 P
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo	DM 28	DM 1028 P – 1928 P
IV	DINAS (DM 29 – DM 46)		
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo	DM 29	DM 1029 P – 1929 P
2	Kosong	DM 30	DM 1030 P – 1930 P
3	Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo	DM 31	DM 1031 P – 1931 P
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Gorontalo	DM 32	DM 1032 P – 1932 P
5	Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo	DM 33	DM 1033 P – 1933 P
6	Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo	DM 34	DM 1034 P – 1934 P
7	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo	DM 35	DM 1035 P – 1935 P
8	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Gorontalo	DM 36	DM 1036 P – 1936 P
9	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	DM 37	DM 1037 P – 1937 P
10	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	DM 38	DM 1038 P – 1938 P
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo	DM 39	DM 1039 P – 1939 P
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo	DM 40	DM 1040 P – 1940 P
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo	DM 41	DM 1041 P – 1941 P
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo	DM 42	DM 1030 P – 1929 P
15	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Gorontalo	DM 43	DM 1043 P – 1943 P
16	Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo	DM 44	DM 1044 P – 1944 P
17	Dinas Kearsioan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	DM 45	DM 1045 P - 1945 P
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Gorontalo	DM 46	DM 1046 P – 1946 P
V	STAF AHLI (DM 47 – DM 49)		
1	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.	DM 47	-
2	Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.	DM 48	-

3	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM	DM 49	-
---	--	-------	---

VI	BIRO DAN KANTOR (DM 50 - DM 59)		
1	Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 50	DM 1050 P – 1950 P
2	Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Gorontalo	DM 51	DM 1051 P – 1951 P
3	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo	DM 52	DM 1052 P – 1952 P
4	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 53	DM 1053 P – 1953 P
5	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 54	DM 1054 P – 1954 P
6	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	DM 55	DM 1055 P – 1955 P
7	Kosong	DM 56	DM 1056 P – 1956 P
8	Ketua Dharma Wanita Provinsi Gorontalo	DM 57	DM 1057 P – 1957 P
9	Poltekes Gorontalo	DM 58	DM 1058 P – 1958 P
10	Kosong	DM 59	DM 1059 P – 1959 P

NO.	PEJABAT / INSTANSI PENGGUNA	NOMOR POLISI	NOMOR BERIKUTNYA
1	2	3	4
VII	INSTANSI VERTIKAL (DM 60 – 99)		
	ESELON II Dan SETARA		
1	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	DM 60	DM 1060 P - 1960 P
2	Kosong	DM 61	DM 1061 P – 1961 P
3	Kanwil Hukum Provinsi Gorontalo	DM 62	DM 1062 P – 1962 P
4	Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	DM 63	DM 1063 P – 1963 P
5	Kanwil Agama Provinsi Gorontalo	DM 64	DM 1064 P – 1964 P
6	Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo	DM 65	DM 1065 P – 1965 P
7	Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo	DM 66	DM 1066 P – 1966 P
8	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo	DM 67	DM 1067 P – 1967 P
9	Perwakilan BPKP Gorontalo	DM 68	DM 1068 P – 1968 P
10	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	DM 69	DM 1069 P – 1969 P
11	Badan Narkotika Provinsi Gorontalo	DM 70	DM 1070 P – 1970 P
12	UPBJJ Universitas Terbuka Gorontalo	DM 71	DM 1071 P – 1971 P
13	Badan Intelijen Daerah Gorontalo	DM 72	DM 1072 P – 1972 P
14	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	DM 73	DM 1073 P – 1973 P
15	Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Gorontalo	DM 74	DM 1074 P – 1974 P
16	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Gorontalo	DM 75	DM 1075 P – 1975 P
17	Lembaga Penyiaran Publik TVRI Gorontalo	DM 76	DM 1076 P – 1976 P
18	Kantor Wilayah Kementerian Haji Dan Umroh Provinsi Gorontalo	DM 77	DM 1077 P – 1977 P
19	Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo	DM 78	DM 1078 P – 1978 P
20	Bandara Udara Djalaluddin Gorontalo	DM 79	DM 1079 P – 1979 P
21	Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Gorontalo	DM 80	DM 1080 P – 1980 P
22	Kantor Bea Dan Cukai Provinsi Gorontalo	DM 81	DM 1081 P – 1981 P

23	Kantor Wilayah Kementerian Pemasyarakatan Provinsi Gorontalo	DM 82	DM 1082 P – 1982 P
24	Balai Sungai Wilayah II Sulawesi Provinsi Gorontalo	DM 83	DM 1083 P – 1983 P
25	Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Gorontalo	DM 84	DM 1084 P – 1984 P
26	Kantor Karantina Hewan Provinsi Gorontalo	DM 85	DM 1085 P – 1985 P
27	Kantor Karantina Tumbuhan Provinsi Gorontalo	DM 86	DM 1086 P – 1986 P
28	Kantor Kesehatan Hewan Provinsi Gorontalo	DM 87	DM 1087 P – 1987 P
29	Sekretariat BAWASLU Provinsi Gorontalo	DM 88	DM 1088 P – 1988 P
30	Kepala Kesyahbandaharaan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gorontalo	DM 89	DM 1089 P – 1989 P
31	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo	DM 90	DM 1090 P – 1090 P
32	Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Gorontalo	DM 91	DM 1091 P – 1991 P
33	Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulut, Sulteng dan Gorontalo (BPCP SULUTTENGGO)	DM 92	DM 1092 P – 1992 P
34	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo	DM 93	DM 1093 P – 1993 P
35	Kosong	DM 94	DM 1094 P – 1994 P
36	Kosong	DM 95	DM 1095 P - 1995 P
37	Badan SAR Nasional Gorontalo	DM 96	DM 1096 P - 1996 P
38	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo	DM 97	DM 1097 P - 1997 P
39	Kepala Badan Karantina Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan Gorontalo	DM 98	DM 1098 P - 1998 P
40	Loka Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Provinsi Gorontalo	DM 99	DM 1099 P - 1999 P

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL